



RENCANA KERJA (RENJA)

TA. 2024

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat, juga merupakan penjabaran per tahun dari Renstra SKPD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 ini disusun menurut sistematika penulisan yang berpedoman pada Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian Rencana Kerja (Renja) ini, Kamipun menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Tahun 2024 ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu memberikan bimbingan taufiq dan hidayah-Nya serta perlindungan kepada kita semua, sehingga tugas dan tanggungjawab yang dibebankan dipundak kita selalu dapat kita laksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Pangkalan Bun, Agustus 2023
KEPALA DINAS



M. ROSIHAN PRIBADI

NIP. 19650502 199102 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar belakang	1
	1.2 Landasan hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika penulisan	6
BAB II	Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu	7
	2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD	7
	2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD	25
	2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	32
	2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	32
	2.5 Penelaahan Usulan Psrogram dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III	Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	44
	3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	44
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	47
BAB IV	Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah	50
BAB V	Penutup	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani perencanaan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dimana penyusunan Renja Perangkat Daerah ini merupakan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat berlandaskan pada undang-undang, tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan peluang dan tantangan di bidang kearsipan dan perpustakaan. Mendukung dan memfasilitasi terbentuknya Dewan Perpustakaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (Pasal 24) tentang Kearsipan yang menyebutkan bahwa kabupaten/kota adalah lembaga kearsipan daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari SKPD, desa, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan serta melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dan pembinaan kearsipan terhadap penciptaan arsip di lingkungan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan berperan sebagai wahana belajar masyarakat untuk menumbuhkan minat baca. Untuk itu perpustakaan perlu dikembangkan tidak terbatas pada sekolah dan desa tapi juga memperhatikan daerah-daerah terpencil.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada pembinaan, pengembangan serta penyelamatan sumber informasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan identifikasi permasalahan dan tantangan yang

dirangkum dalam isu - isu strategis dibidang perpustakaan dan kearsipan. Dari isu-isu strategis tersebut dilakukan strategi pemecahan masalahnya yang menjadi konsep dan kerangka Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat. Renstra dijabarkan ke dalam Renja yang dilaksanakan dengan skala prioritas yang tertuang dalam program dan kegiatan dibidang kearsipan dan perpustakaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

2.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

- Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);

24. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 9);
25. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.3.1 Maksud.

Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan untuk menjabarkan rencana pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tupoksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat dan di implementasikan oleh jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja ini sebagai acuan bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

1.3.2 Tujuan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah sebagai awal Komitmen terhadap kesepakatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan secara partisipatif atas semua komponen terkait dan Konsistensi perencanaan dan penetapan program prioritas sesuai dengan tupoksi serta kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat serta sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024.

1.4. Sistematika penulisan

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 5 Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan (tahun 2023)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu adanya gambaran mengenai capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Realisasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dengan tingkat realisasi daya serap anggaran Keseluruhan Belanja Operasi sebesar 49,02%, sebagai berikut:

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI		
		FISIK	KEUANGAN	
		%	%	Rp.
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.502.526.333	54,36	51,44	2.830.594.698
Program Pembinaan Perpustakaan	509.150.581	32,89	30,04	152.961.766
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	42.817.350	35,07	29,81	12.764.974
Program Pengelolaan Arsip	139.219.736	54,61	31,74	44.192.678
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	7.887.000	00,00	00,00	00,00
Program Perizinan Penggunaan Arsip	999.000	00,00	00,00	00,00
Jumlah Total	6.202.600.000	52,39	49,02	3.040.514.166

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotawaringin Barat s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan) dapat dilihat pada *Tabel T-C.29 sebagai berikut,,*

TABEL T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotawaringin Barat s/d TW. II Tahun 2023 (Tahun berjalan)
Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan(Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2026 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I	II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	16
					K	K	K	K	K	K	K	K	
1.	Terwujudnya Kegemaran Membaca Masyarakat	02.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	27,5 Nilai	0 0	26 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAMN KEARSIPAN
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	8 Nilai	0 0	8 Nilai	4,52 Nilai	10,1 Nilai	10,1 Nilai	10 Nilai	126,25	
				Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	1,8 %	0 0	0,7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0,00	

RENCANA KERJA 2024

				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,2 %	0 0	0,2 %	1,1 %	1,11 %	1,11 %	1 %	553,00	
				Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,7 %	0 0	0,04 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0,00	
		2.23.0 2.2.01 .01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : <i>Information Technology Service Management</i>)	4 Layanan	0 0	1 Layanan	0 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	25,00	
		2.23.0 2.2.01 .02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	78 Perpustakaan	0 0	44 Perpustakaan	0 Perpustakaan	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	7,69	
		2.23.0 2.2.01 .04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang	77 Perpustakaan	0 0	20 Perpustakaan	0 Perpustakaan	4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	5,19	

RENCANA KERJA 2024

			Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan									
		2.23.0 2.2.01 .06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Orang	0 0	70 Orang	12 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	20,00	
		2.23.0 2.2.01 .07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	24 Layanan	0 0	6 Layanan	1 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	20,83	
		2.23.0 2.2.01 .09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	8.827 Eksemplar	0 0	2788 Eksemplar	0 Eksemplar	341 Eksemplar	341 Eksemplar	341 Eksemplar	3,86	
		2.23. 02.2. 02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	Jumlah pemyarakatan gemar membaca di masyarakat	196 Lokus	0 0	25 Lokus	6 Lokus	11 Lokus	11 Lokus	11 Lokus	5,61	

RENCANA KERJA 2024

			Kabupaten/Kota										
		2.23.02.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	196 Lokus	00	25 Lokus	6 Lokus	11 Lokus	11 Lokus	11 Lokus	5,61	
		02.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	27,5 Nilai	00	26 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0,00	
		2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi) /terdaftar yang ada diwilayahnya	4 Naskah	00	1 Naskah	0 Naskah	0,5 Naskah	0,5 Naskah	1 Naskah	12,50	
				Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	4 Naskah	00	1 Naskah	0 Naskah	0,5 Naskah	0,5 Naskah	1 Naskah	12,50	
		2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	370 Orang	00	30 Orang	Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	2,70	

RENCANA KERJA

2024

		2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	4 Eksemplar	00	1 Eksemplar	0 Eksemplar	0,5 Eksemplar	0,5 Eksemplar	1 Eksemplar	12,50
2.	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya secara digital	02.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	30 %	00	10 %	%	%	%	0 %	0,00
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	40 %	00	10 %	14,86 %	81,6 %	81,6 %	82 %	204,00
				Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	40 %	00	10 %	0 %	3,16 %	3,16 %	3 %	7,90

RENCANA KERJA 2024

		2.24.0 2.2.01 .01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2.025 Berkas	00	375 Berkas	0 Berkas	306 Berkas	306 Berkas	306 Berkas	15,11
		2.24.0 2.2.01 .02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	940 Berkas	00	190 Berkas	0 Berkas	6 Berkas	6 Berkas	6 Berkas	0,64
		2.24.0 2.2.01 .03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Laporan	00	20 Laporan	0 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	15,45
		2.24. 02.2. 02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	95 %	00	90 %	22,5 %	45 %	45 %	45 %	47,37
		2.24. 02.2. 02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	400 Arsip	00	50 Arsip	0 Arsip	25 Arsip	25 Arsip	25 Arsip	6,25
		2.24. 02.2. 03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	54 %	00	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0,00

RENCANA KERJA 2024

2.24.0 2.2.03 .01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	25 Pengguna	00	3 Pengguna	0 Pengguna	0 Pengguna	0 Pengguna	0 Pengguna	0,00
2.24.0 2.2.03 .02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	70 Laporan	00	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00
02.24 .03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	61 Nilai	00	50,5 Nilai	0 Nilai	Nilai	Nilai	0 Nilai	0,00

RENCANA KERJA

2024

2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	22,9	%	0	0	0	%	0	%	%	%	0	%	0,00
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	230	Berkas	0	0	0	Berkas	0	Berkas	Berkas	Berkas	0	Berkas	0,00
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/ kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	33	Arsip	0	0	8	Arsip	0	Arsip	0	Arsip	0	Arsip	0,00

RENCANA KERJA 2024

2.24.0 3.2.03 .01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Daftar	0 0	1 Daftar	0 Daftar	0 Daftar	0 Daftar	0 Daftar	0,00
2.24.0 3.2.03 .04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	8 Arsip	0 0	1 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0,00
02.24 .04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	61 Nilai	0 0	50,5 Nilai	0 Nilai	25,3 Nilai	25,3 Nilai	25 Nilai	41,39

RENCANA KERJA 2024

3.	Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten /Kota	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah Kabupaten /Kota yang sesuai NSPK	20	Arsip	0	0	5	Arsip	1	Arsip	2	Arsip	2	Arsip	2	Arsip	10,00	
		2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	20	Arsip	0	0	3	Arsip		Arsip	1	Arsip	1	Arsip	1	Arsip	5,00	
		2.23.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	98,5	%	0	0	97	%	23,27	%	51,4	%	51,4	%	51	%	52,22	
		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	108	Dokumen	0	0	27	Dokumen	8	Dokumen	13	Dokumen	13	Dokumen	13	Dokumen	12,04	
		2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	16	Dokumen	0	0	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	6,25	

RENCANA KERJA 2024

2.23.0 1.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4 Dokumen	0 0	1 Dokumen	0 Dokume n	Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0,00
2.23.0 1.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4 Dokumen	0 0	1 Dokumen	0 Dokume n	Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0,00
2.23.0 1.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	4 Dokumen	0 0	1 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25,00
2.23.0 1.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	4 Dokumen	0 0	1 Dokumen	0 Dokume n	Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0,00

RENCANA KERJA 2024

2.23.0 1.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	0 0	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	25,00
2.23.0 1.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64 Laporan	0 0	16 Laporan	3 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	12,50
2.23. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	1455 Dokumen	0 0	363 Dokumen	70 Dokumen	130 Dokumen	130 Dokumen	130 Dokumen	8,93
2.23.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	0 0	31 Orang/bulan	30 Orang/bulan	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	25,40
2.23.0 1.2.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.320 Dokumen	0 0	330 Dokumen	41 Dokumen	127 Dokumen	127 Dokumen	127 Dokumen	9,62

RENCANA KERJA 2024

2.23.0 1.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	00	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,00
2.23.0 1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	00	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	22 Dokumen	00	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9,09
2.23.0 1.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	00	1 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50,00

RENCANA KERJA 2024

2.23.0 1.2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	0 0	5 Orang	2 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	17,39
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	28 Dokumen	0 0	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	17,86
2.23.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0 0	1 Paket	0,12 Paket	0,5 Paket	0,5 Paket	1 Paket	12,50
2.23.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0 0	1 Paket	0,17 Paket	0,5 Paket	0,5 Paket	1 Paket	10,00
2.23.0 1.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	0 0	1 Paket	0,17 Paket	0,5 Paket	0,5 Paket	1 Paket	12,50
2.23.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	0 0	1 Paket	0,17 Paket	0,5 Paket	0,5 Paket	1 Paket	12,50
2.23.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	0 0	10 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	10,87

2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	13Dokumen	00	3Dokumen	3Dokumen	2Dokumen	2Dokumen	2Dokumen	15,38
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10Unit	00	1Unit	0Unit	0Unit	0Unit	0Unit	0,00
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9Unit	00	6Unit	0Unit	2Unit	2Unit	2Unit	22,22
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5Unit	00	2Unit	0Unit	1Unit	1Unit	1Unit	20,00
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	12Dokumen	00	3Dokumen	2Dokumen	3Dokumen	3Dokumen	3Dokumen	25,00
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4Laporan	00	1Laporan	0Laporan	0,12Laporan	0,12Laporan	0Laporan	3,00
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48Laporan	00	12Laporan	3Laporan	6Laporan	6Laporan	6Laporan	12,50

RENCANA KERJA 2024

2.23.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	0 0	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	16,67
2.23. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	19 Dokume n	0 0	4 Dokumen	3 Dokume n	4 Dokume n	4 Dokumen	4 Dokumen	21,05
2.23.0 1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	0 0	1 Unit	0,08 Unit	0,15 Unit	0,15 Unit	0 Unit	3,75
2.23.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	0 0	4 Unit	0,01 Unit	0,07 Unit	0,07 Unit	0 Unit	0,44
2.23.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	144 Unit	0 0	36 Unit	0,086 Unit	0,25 Unit	0,25 Unit	0 Unit	0,17

RENCANA KERJA

2024

2.23.0 1.2.09 .10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Unit	0	0	1	Unit	0	Unit	0,36	Unit	0,36	Unit	0	Unit	18,00	
-------------------------	---	---	---	------	---	---	---	------	---	------	------	------	------	------	---	------	-------	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Secara umum Tugas Pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu mendukung Kepala Daerah dengan melaksanakan pemenuhan kebutuhan masyarakat, menyediakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan segala jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi manajemen diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan semua kegiatan semua kegiatan perpustakaan dan kearsipan.
2. Menyusun kebijakan dan prosedur serta menetapkan rencana strategis yang berorientasi pada kebutuhan pengguna perpustakaan dan kearsipan.
3. Menetapkan program-program yang akan dilaksanakan serta jaminan untuk memperoleh anggaran untuk pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan kearsipan.
4. Menyusun dan menetapkan tata tertib penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan dengan pendekatan manajemen sistem mutu.
5. Menetapkan sistem dan format laporan yang dilaksanakan masing-masing unit kerja untuk keperluan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kinerja organisasi perpustakaan dan kearsipan.
6. Menyediakan layanan perpustakaan dan kearsipan, serta melaksanakan kegiatan pengolahan, perawatan, pengadaan dan penyajian koleksi perpustakaan dan kearsipan.
7. Mengembangkan perpustakaan dan kearsipan baik mutu layanan, koleksi dan pelaksanaan pembangunan.
8. Mengajak masyarakat untuk berperan dalam membentuk, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, layanan dan pembinaan serta pengawasan perpustakaan dan kearsipan.
9. Mendukung dan memfasilitasi terbentuknya Dewan Perpustakaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotawaringin Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan bidang perpustakaan;
2. Pelaksanaan urusan bidang kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan kebijakan untuk mengembangkan perpustakaan dan Kearsipan di Kotawaringin Barat, yaitu :

1. Peningkatan pengelolaan perpustakaan, melalui :
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan yg demokratis & bebas biaya,
 - b. peningkatan manajemen pengelolaan
 - c. peningkatan sarana, prasarana & fasilitas.

2. Peningkatan kualitas & keberagaman koleksi perpustakaan , melalui :
 - a. Pengembangan koleksi bahan pustaka (pengadaan).
 - b. Kemitraan (pemerintah, swasta, & perorangan)
3. Peningkatan pemasyarakatan & pemanfaatan perpustakaan melalui:
 - a. Sosialisasi
 - b. Promosi (pameran, pawai, lomba-lomba & event)
 - c. Publikasi (media cetak & elektronik)
4. Pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan & teknis lainnya melalui :
 - a. Peningkatan pengetahuan, wawasan & keterampilan (diklat).
 - b. Peningkatan akuntabilitas kinerja.

Terkait dengan kebijakan untuk peningkatan pengelolaan perpustakaan melalui meningkatkan manajemen perpustakaan serta dalam rangka upaya pembudayaan kegemaran masyarakat, khusus Perpustakaan Umum Kotawaringin Barat telah melakukan inovasi layanan perpustakaan, sebagai berikut :

1. Layanan Sirkulasi
2. Layanan Anggota
3. Layanan Bimbingan Pemakai
4. Layanan Pinjam Pakai
5. Layanan Komputer dan Internet
6. Layanan Wi-Fi
7. Layanan Baca ditempat
8. Layanan Referensi
9. Layanan Wisata Pustaka
10. Layanan Audio Visual
11. Layanan Ruang Bermain Anak
12. Layanan Ruang Baca Anak
13. Layanan Story Telling / Mendongeng
14. Layanan Kelas Berbagi
15. Layanan Bermain Anak (Outdoor)
16. Layanan Pustaka Digital / E-book
17. Layanan Perpustakaan Keliling
18. Layanan Arsip berbentuk Video
19. Layanan Arsip berbentuk Film
20. Layanan Arsip berbentuk Peta
21. Layanan Arsip berbentuk Foto
22. Layanan Arsip berbentuk Tekstual/Kertas

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2022 untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut di atas, meliputi :

- A. Pembinaan Perpustakaan, yaitu melalui :

1. Pembinaan Perpustakaan Desa/Kel dan Sekolah dan Pengembangan yang merupakan pengembangan refleksi perpustakaan Desa/Kelurahan,

2. Pelatihan Strategi Pengembangan Perpustakaan;

3. Pembudayaan Kegemaran Membaca, yang meliputi kegiatan Layanan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK);
- B. Pembinaan Tenaga Perpustakaan, yang meliputi :

1. Pertemuan Peer Learning Meeting;

2. Kegiatan Magang Pengelola Perpustakaan.
- C. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, yaitu melalui : Pengadaan buku bahan perpustakaan dan sebagian buku juga didapat melalui hibah/sumbangan.
- D. Layanan dan Kerjasama Perpustakaan, untuk mempromosikan perpustakaan kepada anak-anak dengan cara melakukan kegiatan Story telling / Mendongeng dan kerjasama perpustakaan dalam hal pinjam pakai buku/ bahan pustaka untuk perpustakaan lain, baik perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus maupun perpustakaan desa.
- E. Pelestarian dan perawatan bahan pustaka yang merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh suatu perpustakaan, untuk mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai, disimpan dan melestarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat.
- F. Akuisisi dan Pengolahan Arsip dengan melaksanakan penghimpunan, penataan, pemeliharaan dan penyelamatan arsip inaktif dan statis dengan cara yang sistematis.
- G. Pengelolaan dan preservasi arsip yaitu Melestarikan, merawat dan mengelola arsip daerah yang telah diterima dan dikelola Lembaga Kearsipan Daerah(LKD) melalui perawatan seperti pemberian kapur barus pada box-box arsip inaktif dan statis secara rutin sesuai dengan jadwal dan menjaga keamanan keberadaan arsip-arsip yang dikelola, agar terhindar dari serangan serangga yang akan merusak keutuhan dan keautentikan dari arsip-arsip tersebut.
- H. Layanan dan Pemanfaatan Arsip dengan menelusuri, mengumpul, mengolah, mandata dan menyajikan dalam rangka melakukan pengembangan kearsipan daerah agar terwujud penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip dan kaidah kearsipan.
- I. Pembinaan Kearsipan Pada Perangkat Daerah berupa pendampingan kepada aparatur/ASN di SKPD dalam mengolah arsip pada SKPD melalui Sosialisasi serta kampanye Sadar Arsip untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SKPD perihal pengelolaan dan penataan arsip yang sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku.
- J. Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kearsipan Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- K. Pembinaan Kearsipan ke desa/kelurahan.

Berikut Analisis capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun anggaran 2022 sebagai wujud tercapainya kinerja pelayanan dari target pelaksanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dapat dilihat pada *Tabel T.C.30 berikut,*

TABEL T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indikator sasaran Renstra :													
1	Persentase pengunjung perpustakaan se Kab. Ktw. Barat	-	-	10%	-	-	-	-	45,31%	-	-		-	Rumusan : Jumlah kunjungan ke perpustakaan dalam 1 tahun / jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani x 100%
2	IKM (Index Kepuasan Masarakat) Bidang Perpustakaan	-	-	85,68%	86%	88%	89%	90%	85,68%	83,89%	78,79%	82,80%	83,09%	Rumusan : Survei IKM
3	Persentase lembaga/institusi pemerintah yang telah menerapkan arsip sesuai peraturan perundang undangan	-	-	10%	-	-	-	-	10,53%	-	-		-	Rumusan : Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku / jumlah SKPD x 100%
4	Capaian Nilai Pengawasan /Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan	-	-	65,29%	70%	70%	80%	90%	65,29%	67,54%	77,42%	69,10%	80,80%	Rumusan : Penilaian hasil audit kearsipan eksternal provinsi kalimantan tengah
5	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	-	-	90%	-	-	-	-	97,58%	-	-		-	Rumusan : Rata-rata persentase capaian kegiatan
6	Persentase ketercukupan sarana dan	-	-	90%	-	-	-	-	99,84%	-	-		-	Rumusan : Rata-rata

RENCANA KERJA

2024

	prasarana aparatur													persentase capaian kegiatan
7	Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	-	-	90%	-	-	-	-	99,44%	-	-		-	Rumusan : Rata-rata persentase capaian kegiatan
8	Nilai SAKIP perangkat daerah	-	-	-	CC	B	B	BB	D	-	BB	BB	BB	Rumusan : Nllai Skor
9	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah.	-	-	-	95%	95%	97.5%	99%		95,40%	100%	99,85%	97,23%	Rumusan : Rata-rata persentase capaian kegiatan

Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	IKM (Index Kepuasan Masarakat) Bidang Perpustakaan	90	83,09	92,32%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 1					92,32%	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Capaian Nilai Pengawasan /Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan	90	80,80	89,78%	Tinggi
Capaian sasaran strategis 2					89,78%	

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 91,05% dengan peringkat kinerja **sangat tinggi**.

Data kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022

No	Uraian	Capaian sampai dengan Tahun 2021	Capaian sampai dengan Tahun 2022
1.	Jumlah Perpustakaan se Kab. Ktw. Barat	283 Perpustakaan	297 Perpustakaan
2.	Jumlah Perpustakaan yang dibina di Kab. Ktw. Barat (2018 sd 2022)	72 Perpustakaan	141 Perpustakaan
3.	Jumlah Perpustakaan yang aktif (Desa/Kel dan TBM) se Kab. Ktw. Barat	35 Desa 1 Kel 2 TBM	37 Desa 1 Kel 2 TBM
4.	Anggota Perpustakaan DPK Kab. Ktw. Barat	10.547 Orang	11.274 Orang
5.	Jumlah Koleksi Buku DPK Kab. Ktw. Barat	28.656 Buku	29.864 Buku
6.	Jumlah Judul Buku DPK Kab. Ktw. Barat	11.737 Judul	12.339 Judul
7.	Jumlah Pengunjung se Kab. Ktw. Barat	31.816 Kunjungan	170.800 Kunjungan
8.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	50,1	56,59
9.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	25,17	34,40

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan. :

A. Permasalahan yang dihadapi urusan perpustakaan, antara lain :

- 1) Kurang lancarnya penggunaan jaringan IT karena keterbatasan kapasitas jaringan internet.
- 2) Kekurangan SDM khususnya petugas pengelola IT.
- 3) Koleksi bahan perpustakaan belum sepenuhnya terpenuhinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Perpustakaan daerah belum memenuhi standar nasional kebutuhan pustakawan.
- 5) Sarana dan prasarana sebagian besar perpustakaan di Kabupaten Kotawaringin Barat belum memenuhi standart nasional
- 6) Respon dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi perpustakaan masih rendah.
- 7) Belum maksimalnya peran perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 8) Belum ada regulasi daerah tentang perpustakaan.
- 9) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Pintar, Sudut /Pojoy Baca, dan lain-lain,
- 10) Belum memadainya SDM pengelola perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat,
- 11) Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder dalam hal pemberdayaan perpustakaan, sehingga belum tercapai sinergitas program/kegiatan.
- 12) Ketersediaan koleksi bahan pustaka di perpustakaan desa/kel, TBM masih kurang memadai,
- 13) Belum adanya kesadaran masyarakat tentang keberadaan naskah kuno,
- 14) SDM terkait pengalih mediaan naskah kuno belum tersedia,
- 15) Belum tersedia dalam bidang transliterasi dan terjemahan,
- 16) Terbatasnya koleksi budaya etnis nusantara.

B. Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kearsipan, antara lain:

- 1) Sebagian besar SKPD, Desa/Kelurahan masih kurang memahami tentang arti pentingnya arsip.
- 2) Kurangnya komitmen dan dukungan stakeholder pengelola arsip SKPD, Desa/Kelurahan.
- 3) SKPD sebagai pencipta arsip masih minim perhatiannya untuk menyerahkan arsip statis ke LKD.
- 4) Sebagian besar SKPD belum ada arsiparis.
- 5) Kompetensi tenaga teknis kearsipan di SKPD, Desa/Kelurahan belum memadai.
- 6) Keterbatasan sarana dan prasarana belum memadai untuk penyimpanan arsip pada SKPD dan Desa/Kel.
- 7) Belum adanya Armada Jemput Arsip (mobil sadar arsip) pada LKD

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Dalam menentukan isu-isu penting penyelenggaraan yang terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Untuk lingkungan eksternal akan dipengaruhi oleh kondisi yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung. Untuk isu-isu penting yang bersumber dari lingkungan eksternal, antara lain meliputi :

1. Tranformasi perpustakaan digital seKotawaringin Barat menuju transformasi perpustakaan digital nasional untuk membentuk satu ekosistem digital,
2. Mewujudkan perpustakaan kobar menjadi perpustakaan yang berstandar nasional (Standar Nasional Perpustakaan/SNP),
3. Mewujudkan perpustakaan kobar berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi,
4. Meningkatkan sinergitas dengan stakeholder terkait terhadap pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan, sesuai Standar Nasional Perpustakaan/SNP,
5. Mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno dan budaya etnis nusantara,
6. Meningkatkan Manajemen kearsipan (arsip dinamis maupun arsip statis) bagi SKPD, Desa/Kelurahan dalam rangka mempercepat proses reformasi birokrasi,
7. Mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan, termasuk dalam mengantisipasi penyelamatan dan perlindungan arsip secara elektronik (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024. Pada rancangan awal Rencana Kerja, anggaran dialokasikan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2024 sebesar Rp 7.394.578.227,65,- setelah dilakukan penyesuaian pagu berdasarkan Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 000.7.2.4/407/Bapp-II Tanggal 03 Juli 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, maka dilakukan analisis terhadap hasil kebutuhan untuk operasional pelaksanaan program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024 sebesar Rp. 7.208.308.000,-

Rancangan awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada **Tabel T-C.31 berikut,**

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pembinaan Perpustakaan	DPK	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	26,5 Nilai	620.226.828	Program Pembinaan Perpustakaan	DPK	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	26,5 Nilai	867.460.332	
1.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Persentase ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	8%	590.226.828	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Persentase ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	8%	837.768.553	
		DPK	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	1%			DPK	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	1%		
		DPK	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,2 Nilai			DPK	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,2 Nilai		
		DPK	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,05%			DPK	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,05%		
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	DPK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : <i>Information Technology Service Management</i>)	1 Layanan	18.200.000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	DPK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : <i>Information Technology Service Management</i>)	1 Layanan	18.200.000	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	20 Perpustakaan	45.260.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	25 Perpustakaan	94.304.927	
	Pembinaan Perpustakaan	DPK	Jumlah Perpustakaan pada Satuan	20	5.000.000	Pembinaan Perpustakaan	DPK	Jumlah Perpustakaan pada Satuan	20 Perpustakaan	4.999.950	

RENCANA KERJA 2024

	pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan		pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	41.300.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70 Orang	38.654.612	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	6 Layanan	332.650.000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	6 Layanan	339.624.934	
	Pengembangan Bahan Pustaka	DPK	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	2013 Eks	105.812.828	Pengembangan Bahan Pustaka	DPK	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	3024 Eks	300.020.130	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	DPK	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2013 Eks	42.004.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	DPK	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1546 Eks	41.964.000	
1.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	50 Lokus	30.000.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	50 Lokus	29.691.779	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	DPK	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	50 Lokus	30.000.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	DPK	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	50 Lokus	29.691.779	
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	DPK	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	26,5 Nilai	101.309.500	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	DPK	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	26,5 Nilai	106.354.736	
2.1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi) /terdaftar yang ada diwilayahnya	1 Naskah	70.684.500	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi) /terdaftar yang ada diwilayahnya	1 Naskah	68.212.986	
		DPK	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	1 Naskah			DPK	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	1 Naskah		

RENCANA KERJA 2024

	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	DPK	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	70 Orang	34.072.500	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	DPK	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	30 Orang	31.600.986	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	DPK	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 Eks	36.612.000	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	DPK	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 Eks	36.612.000	
2.2	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan atau terdaftar di wilayah kabupaten (item)	11 Eks	30.625.000	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan atau terdaftar di wilayah kabupaten (item)	11 Eks	38.141.750	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	DPK	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	1 Eks	26.750.000	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	DPK	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	1 Eks	34.266.750	
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	DPK	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	10 Eks	3.875.000	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	DPK	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	10 Eks	3.875.000	
3	Program Pengelolaan Arsip	DPK	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	15%	193.000.000	Program Pengelolaan Arsip	DPK	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	15%	240.999.379	
3.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	20%	40.000.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	20%	54.999.650	
		DPK	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	20 %			DPK	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	20 %		
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	DPK	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	500 Berkas	10.000.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	DPK	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	500 Berkas	30.000.000	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	DPK	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	200 Berkas	10.000.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	DPK	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	200 Berkas	4.999.900	

RENCANA KERJA 2024

	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Laporan	20.000.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Laporan	19.999.750	
3.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	90%	113.000.000	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	90%	105.999.849	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	DPK	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip	113.000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	DPK	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip	105.999.849	
3.3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	DPK	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	22 %	40.000.000	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	DPK	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	22 %	79.999.880	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	5 Pengguna	30.000.000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	5 Pengguna	19.999.950	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	10.000.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	59.999.930	
4	Program Perlindungan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	DPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	60 Nilai	70.000.000	Program Perlindungan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	DPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	60 Nilai	40.988.896	
4.1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	DPK	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	15,27%	40.000.000	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	DPK	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	15,27%	1.000.000	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	DPK	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	55 Arsip	20.000.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	DPK	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0	-	

RENCANA KERJA | 2024

	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	DPK	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	55 Berkas	20.000.000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	DPK	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	55 Berkas	1.000.000	
4.2	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	DPK	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/ kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	8 Arsip	30.000.000	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	DPK	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/ kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	8 Arsip	39.988.896	
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar	5.000.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar	14.999.568	
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Arsip	5.000.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Arsip	4.999.328	
	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Kelurahan	DPK	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	2 Arsip	20.000.000	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Kelurahan	DPK	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	2 Arsip	19.990.000	
5	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	DPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	60 Nilai	2.000.000	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	DPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	60 Nilai	1.998.999	
5.1	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten /Kota	DPK	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah Kabupaten /Kota yang sesuai NSPK	5 Arsip	2.000.000	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten /Kota	DPK	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah Kabupaten /Kota yang sesuai NSPK	5 Arsip	1.998.999	
	Penyediaan Daftar dan	DPK	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan	5 Arsip	2.000.000	Penyediaan Daftar dan	DPK	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan	5 Arsip	1.998.999	

RENCANA KERJA

2024

	Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			
6	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	DPK	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97,5%	6.408.041.900	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	DPK	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97,5%	5.950.505.658	
6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPK	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27 Dokumen	45.106.250	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPK	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27 Dokumen	44.500.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPK	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	37.205.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPK	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	37.195.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPK	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.126.250	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPK	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.115.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPK	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.878.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPK	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.912.500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPK	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.448.250	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPK	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.336.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPK	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.448.250	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPK	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.336.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	336.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPK	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPK	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	269.000	
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPK	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	364 Dokumen	4.515.344.229,65	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPK	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	364 Dokumen	4.710.537.050,00	

RENCANA KERJA

2024

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	4.371.320.229,65	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	4.569.514.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPK	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	330 Dokumen	115.274.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPK	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	330 Dokumen	115.273.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPK	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPK	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.499.650	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPK	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.500.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPK	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	- Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPK	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPK	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	249.700	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPK	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPK	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Dokumen	0	
6.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPK	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPK	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	0 Dokumen	0	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPK	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPK	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Dokumen	0	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPK	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPK	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPK	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPK	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	- Dokumen	0	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPK	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.250.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPK	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dokumen	0	

RENCANA KERJA | 2024

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPK	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.250.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPK	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dokumen	0	
6.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPK	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	7 Dokumen	118.300.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPK	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	7 Dokumen	99.520.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPK	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	31.800.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPK	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	31.800.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPK	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPK	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Dokumen	0	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DPK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DPK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Dokumen	0	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DPK	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.500.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DPK	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Dokumen	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	80.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	67.720.000	
6.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPK	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	8 Dokumen	225.725.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPK	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	8 Dokumen	231.657.578	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.310.375	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPK	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPK	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.996.709	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPK	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPK	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.996.494	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPK	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPK	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.164.750	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	129.615.500	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPK	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	16.725.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPK	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	9.573.750	

RENCANA KERJA | 2024

6.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPK	Jumlah dokumen pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	6 Dokumen	842.414.350	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPK	Jumlah dokumen pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	6 Dokumen	224.232.432	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPK	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	750.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPK	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	34.442.190	
	Pengadaan Mebel	DPK	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	43.350.000	Pengadaan Mebel	DPK	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	69.222.375	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	49.064.350	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	120.567.867	
6.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPK	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	3 Dokumen	383.050.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPK	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	3 Dokumen	384.813.339	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.050.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.050.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	182.233.539	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	202.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	201.529.800	
6.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPK	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	6 Dokumen	272.602.070	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPK	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	6 Dokumen	255.244.759	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPK	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.774.527	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPK	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.774.527	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	53.497.543	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	52.884.464	
	Pemeliharaan Mebel	DPK	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	DPK	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	15.000.000	

RENCANA KERJA

2024

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	39.330.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	29.995.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	DPK	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	DPK	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPK	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	125.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPK	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	112.590.768	
TOTAL					7.394.578.227,65	7.208.308.000,00					

Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD 2024 sesuai Tabel T-C.31 diatas, Rencana Kerja Perubahan sesuai hasil analisis belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya mengingat kebijakan umum anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dialokasikan pada Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat masih terbatas.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Khusus untuk Urusan Perpustakaan dan Kearsipan, usulan-usulan tersebut tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025, sebagai berikut:

- 1)

Kelembagaan politik dan hukum yang mantap,
- 2)

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat,
- 3)

Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh,
- 4)

Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir dan Dalam upaya Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, pada tahun 2024 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), yaitu :

- 1)

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
- 2)

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
- 3)

Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing,
- 4)

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
- 5)

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
- 6)

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
- 7)

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang diprioritaskan di tahun 2024, telah ditetapkan beberapa target pembangunan, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis, eliminasi malaria, kusta, serta peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment). Oleh karena itu Adapun tantangan dalam upaya meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas yaitu peningkatan kemampuan literasi masyarakat dalam memperoleh, mengolah, serta memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Dalam upaya mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, melalui :

- a)

Peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum dan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial;
- b)

Pengembangan konten literasi terapan; dan

c) Pengembangan pusat-pusat layanan literasi berbasis digital.

Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas untuk Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

• Perpustakaan

Arah kebijakan Pembangunan Nasional dibidang Perpustakaan dalam Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan secara garis besar menyebutkan bahwa perpustakaan merupakan sebuah institusi yang mengelola koleksi karya cipta manusia yang berguna untuk memenuhi pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pengguna perpustakaan. Dengan ini maka perlu adanya pengelolaan perpustakaan berbasis standar nasional perpustakaan untuk meningkatkan ketermanfaatan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kualitas hidup masyarakat, kemudian untuk meningkatkan minat baca maka perlu dilakukan peningkatan pembudayaan gemar membaca melalui pegiat literasi daerah dengan sasaran satuan keluarga, pendidikan, dan masyarakat.

Dan untuk mendukung berbagai informasi masa lalu maka perlu dilakukan upaya pembangunan *respositori* (tempat penyimpanan), pelestarian dan pengkajian berbagai karya cetak dan rekam, naskah kuno nusantara sebagai khazanah intelektual dan warisan dokumenter budaya bangsa, pembangunan koleksi indonesia, pangkalan data katalog induk daerah dan bibliografi daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 antara lain :

- 1) Pengembangan koleksi bahan perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat;
- 2) Peningkatan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga perpustakaan daerah;
- 4) Penguatan kerjasama antar organisasi pemerintah daaerah yang dengan kerangka regulasi daerah;
- 5) Penguatan infrastruktur pendukung layanan perpustakaan;
- 6) Pemasyarakat kegemaran membaca;
- 7) Fasilitasi penggiat literasi dan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat;
- 8) Karya cetak, karya rekam dan elektronik daerah yang dihimpun dan diakusisi;
- 9) Karya cetak, karya rekam dan eletronik daerah dilestarikan;
- 10) Bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikaji, dilakukan alih bahasa, alih aksara, alih bentuk media;
- 11) Jumlah judul terbitan dan rekaman yang tercantum dalam katalog induk daerah; dan
- 12) Perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi daerah.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada Pasal 40 ayat (1) dan (2) berbunyi :

1. Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
2. Pendanaan perpustakaan bersumber dari :
 - a. APBN dan/atau APBD.
 - b. Sebagian anggaran pendidikan.
 - c. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat.
 - d. Kerjasama yang saling menguntungkan.
 - e. Bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
 - f. Hasil usaha jasa perpustakaan dana atau
 - g. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan pada Pasal 40 ayat (1) tersebut adalah prinsip pengalokasian anggaran yang memungkinkan seluruh fungsi perpustakaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, lancar, meningkat dan berkelanjutan.

Mengacu pada undang-undang tersebut, anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotawaringin Barat masih belum memadai untuk mengakomodir seluruh kegiatan dibidang perpustakaan.

● Kearsipan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, guna mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan efisien, maka pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota perlu menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) -TIK dan menjadi simpul jaringan serta mengimplementasikan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Dengan ini, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah guna mendukung kebijakan nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang belum menerapkan SIKD-TIK, termasuk permasalahannya;
- 2) Mendorong pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menerapkan SIKD-TIK dengan menerbitkan suatu kebijakan;
- 3) Mengidentifikasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang belum menjadi simpul JIKN;
- 4) Mendorong pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menjadi simpul JIKN dan mendorong Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah menjadi simpul JIKN untuk mengelola data pada simpul JIKN dengan menerbitkan suatu kebijakan;
- 5) Memastikan ketersediaan seluruh perangkat yang diperlukan, misalnya Arsiparis, infrastruktur, Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan WaliKota tentang Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan lain-lain.

Dalam Undang - undang No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 1 butir 29 dan 30 disebutkan bahwa Sistim Informasi Kearsipan Nasional menggunakan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang disebut SIKN dan JIKN. SIKN dan JIKN merupakan arah kebijakan nasional dibidang kearsipan sebagai tuntutan kemajuan teknologi yang diharapkan sistem ini dilaksanakan oleh semua kabupaten. Untuk Teknologi Informasi Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini belum bisa menerapkan karena terkendala pada terbatasnya sarana prasarana.

Sedangkan untuk mendukung Program Nasional Arsip masuk Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotawaringin Barat pada tahun 2024 melanjutkan pembinaan kearsipan desa/kelurahan yang belum dibina dan secara bertahap, dan melakukan monitoring dan evaluasi kearsipan terhadap desa/kelurahan yang telah diadakan pembinaan.

Aplikasi kebijakan nasional Nawacita pada program akuntabilitas arsip sebagai elemen pokok penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai urusan wajib.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

• Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu satu sampai lima tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan pelayanan perpustakaan yang prima.
2. Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan yang berbasis digital.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

• Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dengan demikian sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Fokus utama sasaran adalah tindakan, alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumber daya manusia yang mengarah pada hasil nyata.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya kegemaran membaca masyarakat.
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya secara digital.
3. Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotawaringin Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -			
				2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan pelayanan perpustakaan yang prima	Terwujudnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	85	87	88
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	50,5	51	51,5	52
2.	Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan yang berbasis digital	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya secara digital	Persentase Jumlah SKPD yang menerapkan e-arsip	16%	22%	32%	54%
			Persentase arsip yang telah dibuatkan daftar arsip melalui e-arsip	16%	22%	32%	54%
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	B (68)	BB (70)	BB (70)	A (80)
			Indeks Kepuasan Aparatur	90	90	90	90

Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2023-2026

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator - indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama yang direncanakan untuk tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Awal periode Renstra Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
					2023	2024	2025	2026	2026
1	Mewujudkan pelayanan perpustakaan yang prima		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,801	83	85	87	88	88
		Terwujudnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	50,1	50,5	51	51,5	52	52
2	Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan yang berbasis digital		Persentase Jumlah SKPD yang menerapkan e-arsip	-	16%	22%	32%	54%	54%
		Meningkatnya ketersediaan arsip yang aurentik, utuh dan terpecaya secara digital	Persentase arsip yang telah dibuatkan daftar arsip melalui e-arsip	-	16%	22%	32%	54%	54%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka memujudkan Visi dan Misi, Strategi dan Arah kebijakan serta pencapaian sasaran strategis, maka ditetapkan 6 Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2024 sesuai dengan Pagu Indikatif yang telah ditetapkan Bupati Kotawaringin Barat, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan N askah Kuno;
4. Program Pengelolaan Arsip;
5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
6. Program Perizinan Penggunaan Arsip.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, sesuai dengan alokasi anggaran yang ada, ditetapkan 17 Kegiatan di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota;
11. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota;
13. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota;
14. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota;
15. Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun;
16. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
17. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

Dengan 54 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
9. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD;
12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
13. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
15. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
16. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
19. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
20. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
21. Pengadaan Mebel;
22. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
23. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
28. Pemeliharaan Mebel;
29. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
30. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
31. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
32. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik;
33. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
34. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
35. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
36. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota;
37. Pengembangan Bahan Pustaka;
38. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka;
39. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat;
40. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno;
41. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan;
42. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara;
43. Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara;
44. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis;
45. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis;
46. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota;
47. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis;
48. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN;
49. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota;
50. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun ;
51. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

- 52. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 53. Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan.
- 54. Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada *Tabel T-C.33 berikut*,

RENCANA KERJA

2024

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Kode					KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							7.208.308.000,00				7.394.578.227,65	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.208.308.000,00					7.394.578.227,65
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							6.924.320.726,00					7.129.578.227,65
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.950.505.658,00					6.408.041.899,65
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							44.500.500,00					45.106.250,00
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JUmlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.5 %	4 Dokumen	27 Dokumen	37.195.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	37.205.000,00
2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	JUmlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Dokumen	27 Dokumen	2.115.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.126.250,00
2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												

RENCANA KERJA

2024

					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JUmlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Dokumen	27 Doku men	1.912.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.878.500,00
2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	JUmlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Dokumen	27 Doku men	1.336.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.448.250,00
2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	JUmlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Dokumen	27 Doku men	1.336.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.448.250,00
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												

RENCANA KERJA

2024

					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	JUmlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	3 Laporan	27 Doku men	336.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	500.000,00
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JUmlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	16 Laporan	27 Doku men	269.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	500.000,00
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.710.537.050,00					4.515.344.229,65
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	33 Orang/bulan	364 Doku men	4.569.514.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.371.320.229,65
2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	330 Dokumen	364 Doku men	115.273.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	330 Dokumen	115.274.000,00
2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												

RENCANA KERJA 2024

					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Laporan	364 Dokumen	25.499.650,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.500.000,00
2	23	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Dokumen	364 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.500.000,00
2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	2 Laporan	364 Dokumen	249.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	250.000,00
2	23	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Dokumen	364 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.500.000,00
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0,00					5.500.000,00

RENCANA KERJA

2024

2	23	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	2 Dokumen	5 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00
2	23	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	2 Dokumen	5 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00
2	23	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	2 Laporan	5 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	1.000.000,00
2	23	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Laporan	5 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.250.000,00
2	23	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	2 Laporan	5 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.250.000,00
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							99.520.000,00					118.300.000,00
2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												

RENCANA KERJA

2024

					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Paket	7 Doku men	31.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	31.800.000,00
2	23	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Dokumen	7 Doku men	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000,00
2	23	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Dokumen	7 Doku men	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000,00
2	23	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Dokumen	7 Doku men	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.500.000,00
2	23	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	8 Orang	7 Doku men	67.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	80.000.000,00
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							231.657.578,00					225.725.000,00
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												

RENCANA KERJA 2024

					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.5 %	1 Paket	8 Dokumen	8.310.375,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Paket	8 Dokumen	45.996.709,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.000.000,00
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Paket	8 Dokumen	14.996.494,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Paket	8 Dokumen	23.164.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	14 Laporan	8 Dokumen	129.615.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	120.000.000,00
2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	250 Dokumen	8 Dokumen	9.573.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	16.725.000,00
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							224.232.432,00					842.414.350,00
2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

RENCANA KERJA

2024

					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Unit	6 Doku men	34.442.190,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	750.000.000,00
2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	30 Unit	6 Doku men	69.222.375,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	43.350.000,00
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	14 Unit	6 Doku men	120.567.867,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	49.064.350,00
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							384.813.339,00					383.050.000,00
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Laporan	3 Doku men	1.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.050.000,00
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Laporan	3 Doku men	182.233.539,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	180.000.000,00
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Laporan	3 Doku men	201.529.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	202.000.000,00
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							255.244.759,00					272.602.070,00

RENCANA KERJA

2024

2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Unit	6 Doku men	34.774.527,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.774.527,00
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	5 Unit	6 Doku men	52.884.464,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	53.497.543,00
2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	30 Unit	6 Doku men	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	10.000.000,00
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	35 Unit	6 Doku men	29.995.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	39.330.000,00
2	23	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya												

RENCANA KERJA 2024

					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	20 Unit	6 Doku men	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000,00
2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	97.5 %	1 Unit	6 Doku men	112.590.768,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	1 Unit	125.000.000,00
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							867.460.332,00					620.226.828,00
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							837.768.553,00					590.226.828,00
2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik												
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Persentase ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	26,5 Nilai	1 Layanan	8 % 1 % 0,2 Nilai 0,05 %	18.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	18.200.000,00
2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												

RENCANA KERJA 2024

					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Persentase ketermanfaatan Perpustakaan oleh MasyarakatPersentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kel/Desa	26,5 Nilai	25 Perpustakaan	8 % 1 % 0,2 Nilai 0,05 %	94.304.927,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	25 Perpustakaan	45.260.000,00
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan												
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan Perpustakaan oleh MasyarakatPersentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional PerpustakaanRasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan pendudukRasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26,5 Nilai	20 Perpustakaan	8 % 1 % 0,2 Nilai 0,05 %	4.999.950,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan	5.000.000,00
2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												

RENCANA KERJA 2024

					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26,5 Nilai	70 Orang	8 % 1 % 0,2 Nilai 0,05 %	38.654.612,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70 Orang	41.300.000,00
2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota												
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Persentase ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	26,5 Nilai	6 Layanan	8 % 1 % 0,2 Nilai 0,05 %	339.624.934,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	6 Layanan	332.650.000,00
2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka												

RENCANA KERJA 2024

					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	Persentase ketermanfaatan Perpustakaan oleh MasyarakatPersenta se Perpustakaan sesuai Standar Nasional PerpustakaanRasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	26,5 Nilai	3024 Eksemplar	8 % 1 % 0,2 Nilai 0,05 %	300.020.130,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	3024 Eksemplar	105.812.828,00
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka												
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan Perpustakaan oleh MasyarakatPersenta se Perpustakaan sesuai Standar Nasional PerpustakaanRasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan pendudukRasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	26,5 Nilai	1546 Eksemplar	8 % 1 % 0,2 Nilai 0,05 %	41.964.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1546 Eksemplar	42.004.000,00
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							29.691.779,00					30.000.000,00
2	23	02	2.02	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat												

RENCANA KERJA 2024

					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26,5 Nilai	50 Lokus	50 Lokus	29.691.779,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	50 Lokus	30.000.000,00
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							106.354.736,00					101.309.500,00
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota							68.212.986,00					70.684.500,00
2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno												
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayahnya JUmlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26,5 Nilai	30 Orang	1 Naskah 1 Naskah	31.600.986,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	30 Orang	34.072.500,00
2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan												
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayahnya JUmlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26,5 Nilai	1 Eksemplar	1 Naskah 1 Naskah	36.612.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 Eksemplar	36.612.000,00
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							38.141.750,00					30.625.000,00
2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara												

RENCANA KERJA

2024

					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan atau terdaftar di wilayah Kabupaten (Item)	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26,5 Nilai	1 Eksemplar	11 Ekse mpla r	34.266.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	1 Eksemplar	26.750.000,00
2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara												
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan atau terdaftar di wilayah Kabupaten (Item)	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	26,5 Nilai	10 Eksemplar	11 Ekse mpla r	3.875.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	10 Eksemplar	3.875.000,00
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							283.987.274,00					265.000.000,00
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							240.999.379,00					193.000.000,00
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							54.999.650,00					40.000.000,00
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis												
					Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	15 %	500 Berkas	20 % 20 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	500 Berkas	10.000.000,00
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis												

RENCANA KERJA 2024

					Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	15 %	200 Berkas	20 % 20 %	4.999.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	200 Berkas	10.000.000,00
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	25 Laporan	20 % 20 %	19.999.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Laporan	20.000.000,00
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							105.999.849,00					113.000.000,00
2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis												
					Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	15 %	100 Arsip	90 %	105.999.849,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip	113.000.000,00

RENCANA KERJA

2024

					Kearsipan												
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							79.999.880,00					40.000.000,00
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN												
					Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	15 %	5 Pengguna	22 %	19.999.950,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	5 Pengguna	30.000.000,00
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota												
					Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	15 %	15 Laporan	22 %	59.999.930,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	10.000.000,00
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							40.988.896,00					70.000.000,00
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun							1.000.000,00					40.000.000,00
2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun												

RENCANA KERJA

2024

					Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawabana setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	60 Nilai	55 Arsip	15.27 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	55 Arsip	20.000.000,00
2	24	03	2.01	0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun												
					Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawabana setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	60 Nilai	55 Berkas	15.27 %	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	55 Berkas	20.000.000,00
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan							39.988.896,00					30.000.000,00
2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota												

RENCANA KERJA 2024

					Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsiPenyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK di Provinsi	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	60 Nilai	1 Daftar	8 Arsip 8 Arsip	14.999.568,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar	5.000.000,00
2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota												
					Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK di Provinsi	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	60 Nilai	5 Arsip	8 Arsip 8 Arsip	4.999.328,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Arsip	5.000.000,00
2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan												

RENCANA KERJA

2024

					Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawabana setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK di Provinsi	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Nilai	2 Arsip	8 Arsip 8 Arsip	19.990.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	2 Arsip	20.000.000,00
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP							1.998.999,00					2.000.000,00
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota							1.998.999,00					2.000.000,00
2	24	04	2.01	0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup												
					Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawabana setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten /Kota yang sesuai NSPK	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	60 Nilai	5 Arsip	5 Arsip	1.998.999,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	5 Arsip	2.000.000,00
TOTAL												7.208.308.000,00					7.394.578.227,65

BAB V

PENUTUP

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai wujud atas rencana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan yang dibuat berdasarkan target dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai bahan untuk penyusunan usulan rencana program dan kegiatan yang bersumber dari APBD dan DAK Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Keberhasilan program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja TA. 2024 ini perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional serta berintegritas tinggi, maka Setiap ASN dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan,
- 2) Perlunya komitmen yang tegas dari pimpinan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perpustakaan dan kearsipan,
- 3) Renja TA. 2024 Sebagai langkah awal yang dituangkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan dimana pendanaannya telah disesuaikan dengan pagu Indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat, walaupun dalam pembahasan nanti terjadi perubahan anggaran, program dan kegiatan yang diusulkan tetap akan dilaksanakan,
- 4) Perlunya peningkatan kualitas ASN dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM),
- 5) Akan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta melaporkan hasilnya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana tindak lanjut :

- 1) Dalam rangka mengoptimalkan rencana kinerja penyelenggaran pemerintahan, maka setiap bidang pada lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat secara langsung bertanggung jawab terhadap rencana kerja tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan rencana kerja ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran dan Perjanjian Kinerja.
- 2) Setiap penanggung jawab kegiatan melaksanakan pengendalian secara periodik melalui pelaporan, monitoring dan evaluasi setiap triwulanan. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, sedangkan

evaluasi pelaksanaan kegiatan bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

HgO;

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja TA. 2024 ini perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional serta berintegritas tinggi. Semoga Rencana Kerja yang telah disusun dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perpustakaan dan kearsipan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan/arahan guna optimalisasi dan peningkatan atas hasil kinerja dalam pelaksanaan tugas sehingga penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan baik sebagaimana tujuan yang diinginkan serta berkesinambungan. Terima Kasih

Pangkalan Bun, Agustus 2023

KEPALA DINAS

M. ROSIHAN PRIBADI
NIP. 19650502 199102 1 002

